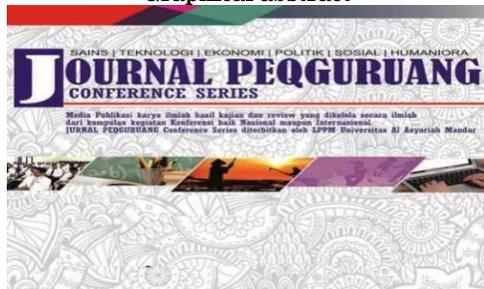


Graphical abstract



PERAN KEPEMIMPINAN ADAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI DESA SAMPALE KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR KABUPATEN MAMASA)

¹ H.Sjuaib Hannan, ²Ahmad Saleh, ¹ Reski
¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
reskisampale123@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the role of traditional leadership in the implementation of local wisdom-based Sampale Village Government. Sources of data in this study were informants totaling 17 people. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The analytical technique used is qualitative data analysis which is a description and interpreting of data obtained in the field from existing informants. The results of the analysis show that the concept of customary leadership in Sampale village still highly respects local wisdom seen from the determination of policies that are often carried out in consultation with the prevailing customary institutions. The influencing factors are such as the external adaptation dimension in which the leader has sought external interests and adapts to the prevailing leadership in Sampale village. The indicators are the dimensions of internal integration, the dimensions of basic assumptions. The Influence of Internal Indigenous Leadership is divided into three, namely Artifacts where activities or organizational forms look like organizational structures and processes, the physical environment of the organization and the products produced, Then Espoused Values, the second level is the values that are supported, consisting of strategies, goals, and organizational philosophy. This level has an important meaning in leadership, these values must be instilled in every member of the organization, and the Underlying Assumption, the underlying assumption, which is a belief that is considered to have existed in each member about the organization which includes aspects of belief, thinking and feeling attachment to the organization.

Keywords: Roles, Indigenous Leadership, Local Wisdom, Sampale Village.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sampale Berbasis Kearifan Lokal. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 17 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa Konsep kepemimpinan adat di desa sampale masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dilihat dari penentuan kebijakan sering dilakukan dengan musyawarah bersama lembaga adat yang belaku. Adapun factor yang mempengaruhi yaitu seperti dimensi adaptasi eksternal yang mana pemimpin sudah mengupayakan kepentingan-kepentingan dari luar dan menyesuaikan dengan kepemimpinan yang berlaku di desa sampale. Adapun indikatornya yaitu dimensi integrasi internal, dimensi asumsi-asumsi dasar. Adapun Pengaruh Kepemimpinan Adat Internal di bagi atas tiga yaitu Artefacts dimana kegiatan atau bentuk organisasi terlihat seperti struktur organisasi maupun proses, lingkungan fisik organisasi dan produkproduk yang dihasilkan, Lalu *Espoused Values*, tingkat kedua adalah nilai-nilai yang didukung, terdiri dari strategi, tujuan, dan filosofi organisasi. Tingkat ini mempunyai arti penting dalam kepemimpinan, nilai-nilai ini harus ditanamkan pada tiap-tiap anggota organisasi, dan *Underlying Assumption*, asumsi yang mendasari, yaitu suatu keyakinan yang dianggap sudah harus ada dalam diri tiap-tiap anggota mengenai organisasi yang meliputi aspek keyakinan, pemikiran dan keterikatan perasaan terhadap organisasi.

Kata Kunci : Peran, Kepemimpinan Adat, Kearifan Lokal, Desa Sampale

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.3040](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.3040)

Received : 30/07/2022 / Received in revised form : 30/07/2022 / Accepted : 25/05/2024

1. PENDAHULUAN

Desa adalah salah satu bagian terkecil dari negara dan upaya pemerintah pusat untuk memajukan desa terus berlanjut. Mari kita mulai dengan kebijakan terhadap pedesaan. Desa juga diberikan otonomi untuk mengatur dan mengendalikan jalannya pemerintahan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa untuk kemajuan desa (Ardiansyah P, 2018). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, kini sudah ada beberapa undang-undang yang mendukung UU Desa, yang mengatur secara eksklusif dan mandiri. UU No. 22 tahun 1948 dan undang-undang nomor. 1957 tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Untuk asas pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 19 tentang Desa Praaja Tahun 1965, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Awal Mula Desa sampai Pasal 200 ke Pasal 216.

Wajah baru desa menginginkan agar undang-undang desa disertai dengan posisi, peran dan kewenangan baru desa. Karena dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya kewenangan desa hanya objek, dan UU No 1 Tahun 2014 dan UU No 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa dan Peraturan Desa (2015: 6-7) diatur oleh pemerintah, menjelaskan bahwa itu bukan organisasi dan sistem pemerintahan daerah/kota (local government). Peran, kedudukan dan perannya sangat besar dan luas dalam pengaturan dan pengelolaan desa. Model pembangunan yang dulu dikembangkan oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, kini menjadi pembangunan desa berbasis sistem (Arifin, H. Syamsul, 2012).

Dari segi politik, undang-undang desa memungkinkan lokasi desa menjadi lokasi program pembangunan pemerintah, berbeda dengan sebelumnya, yang hanya terbatas pada lokasi program pembangunan. Ini memberdayakan pemerintah, pembangunan dan masyarakat dengan sendirinya. Desa akan menjadi subjek pembangunan dan akan dibuka kembali sebagai objek dengan pendekatan fasilitasi, pembebasan dan integrasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban, tidak seperti tabel sebelum menggunakan pendekatan perkalian pusat (Eko Maulana Ali, 2012).

Desa mandiri adalah desa yang tidak terikat dengan kontrol pemerintah dimana tiap desa memiliki sistem adat yang mengontrol rakyatnya dan rakyat di desa tersebut akan mengikuti kebiasaan yang berlaku dimana pada masa orde baru tidak memiliki hukum desa yang berlaku (Nur Aedah, 2017). Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan desa, dalam undang-undang tersebut desa memiliki hak dalam sistem pemerintahan unit terkecil di dalam wilayah NKRI yang disebut dengan desa. Sehingga maksud lain dari pembahasan ini adalah jenis kekuasaan adat sudah tidak berlaku lagi dalam era moderan ini.

Di desa Sanpale sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 memiliki bentuk kepemimpinan adat yang dipimpin oleh lembaga adat, dimana kepemimpinan adat yang disebut lembaga adat mempengaruhi pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan walikota

dipilih secara demokratis menurut adat, diadakan pemilihan kepala desa harus dengan musyawarah. Konsensus oleh semua elemen masyarakat di mana ia diikutsertakan. Sudah ada pemangku kepentingan dan pemerintah tradisional yang terpilih.

Pemerintahan *Lembaga adat* dalam Hal ini didasarkan pada agama dan adat istiadat Pancasila. Karena mereka memiliki landasan yang sama dan mewarnai pemerintahan desa. Kepemimpinan tradisional sendiri memiliki Mawa, yang tertanam dalam benak masyarakat dan dipilih oleh orang-orang yang berwibawa dan karismatik, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di pedesaan. Agar masyarakat bahu membahu membangun desa (Ardiansyah P, 2018).

Namun, karena pemerintahan desa telah digantikan oleh pemerintah desa, hal itu mempengaruhi dan mempengaruhi sistem adat. Tradisi lokal mulai melemah di bawah pengaruh modernisasi, dan kearifan lokal untuk membangun kemakmuran berangsur-angsur menghilang (Antariksa, 2012). Untuk itu, kepemimpinan adat tentu sangat penting karena dapat memimpin kemajuan desa secara sadar dan tidak terikat birokrasi dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepemimpinan informal, juga dikenal sebagai kepemimpinan, adalah tipe non-pengangkatan dan tidak ditemukan dalam struktur organisasi formal. Namun, efektivitas kepemimpinan informal dapat dilihat dari pengakuan dan penerimaan yang sebenarnya atas praktik kepemimpinan bawahan (Dewi, Andi Ratnasari dan Dr. Hasniaty, 2014).

Saat berada di luar kawasan, para pemimpin bebas berpikir, memilih, dan mengambil keputusan melalui hati nurani (kehendak). Namun ketika memasuki Sistem politik dan birokrasi, perilakunya telah berubah. Mereka tidak lagi mandiri, tetapi cenderung ter subordinasi. Atau, mereka cenderung memilih kepemimpinan daripada kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem kepemimpinan informal yang kuat di luar sistem politik dan birokrasi (Davis, Keith dan Newstrom, 2014)

Dalam kepemimpinan adat, masyarakat antusias mengikuti tokoh desa dan permukiman, kepemimpinan adat berhasil mengkoordinir masyarakat, masyarakat permukiman bersatu padu dalam pembangunan permukiman, dan Gotong Royong merupakan elemen sosial dalam pemerintahan desa (Schein, Edgar H, 2010). Seluruh komponen masyarakat bahu membahu membangun desa. Institusi tradisional mengajar dengan integritas dan kejelasan, dan dengan ketulusan. Hal baik lahir karena kejujuran tetap terjaga. Desa dan pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan susunannya sendiri berdasarkan asal-usul tertentu. Alasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1-2 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Kembali ke sejarah pemerintahan yang benar-benar merdeka, pemerintahan desa, sebelum

penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang ada di Indonesia, pemerintahan desa tetap bertahan, dan tidak hilang atau ketinggalan zaman.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pemerintahan desa bahkan diabadikan dalam salah satu pasal dan penjelasannya dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

- (1) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.*

Kemajuan desa merupakan penentu kemajuan bangsa dan harus mendukung hak atas otonomi dan kemandirian berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Mengingat betapa pentingnya kebiasaan itu sendiri.

Ketika cendekiawan, pemimpin kerajaan, dan ahli profesional membangun kepemimpinan untuk alasan murni, itu dikatakan sebagai hukum akal. Sebaliknya jika dirumuskan dari kitab agama yang ditulis langsung oleh penciptanya, maka dikatakan hukum agama yang bermanfaat bagi dunia dan kehidupan yang akan datang.

Melihat kembali sejarah, komunitas dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia seolah-olah memiliki pemerintahan sendiri (*self governing community*) Ini adalah kedaerahan tradisional yang mengelola tanah ulayat secara otonom. Itu terus bergerak secara alami dan dipertahankan sesuai dengan tradisinya (Geurtjens, H, 2016).

Hampir dapat dipastikan bahwa hanya masyarakat Indonesia saja yang tidak memiliki kekuatan adat istiadat dan ciri-ciri sosial budaya asli yang dilambangkan dengan gotong royong Bhinneka-an (Tunggal Ika). Kehadiran masyarakat Indonesia sangat memungkinkan untuk bersosialisasi. Masyarakat dunia saat ini hanya tercatat dalam sejarah. Menurut Grootaert, masyarakat (negara) yang tidak mampu membangun, mengembangkan, dan memelihara modal sosial budaya adalah bangsa yang "sangat sial". Maju mundurnya suatu negara dapat dikatakan sangat bergantung pada adat istiadat dan kemampuannya untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatan sosial budaya.

Tarik menarik antara pemerintah dan masyarakat adat tidak bisa dihindari. Hingga saat ini, pembentukan dan pengaturan otonomi desa adat masih menjadi tantangan dan dilema. Pemerintah tidak bisa seenaknya menghilangkan adat dalam rangka memodernisasi pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan, namun di sisi lain, beberapa adat tidak memenuhi kebutuhannya dan dibiarkan begitu saja, sehingga mempersulit reformasi dan transformasi pemerintahan menuju tata pemerintahan yang lebih baik.

Kepemimpinan Informal salah satunya ialah kepemimpinan adat yang disebut dengan *Lembaga adat* dalam pemerintahan dusun di Desa Sampale, yang

penyediaan kekayaan adat istiadat dan kebudayaan yang luhur. Salah satu kearifan lokal di sampale sampai sekarang masih terjaga yaitu *appa' kada sarandan* seperti halnya *Sara solo/rambu solo* yang mana saat ada orang meninggal akan diacarakan dengan gaya adat istiadat yang ada di desa sampale, lalu ada juga *Sara tukak/rambu tukak* yang mana pada acara ini di rayakan bila ada yang ingin menikah lebih tepatnya pesta pernikahan yang di lakukan di desa sampale, lalu *sara totiboyong* acara turun kesawa adalah sakegiatan yang di lakukan masyarakat desa sampale sebelum turun kesawa atau kebun untuk memulai menanam lalu penyelesaian masalah bila ada masalah yang terjadi di desa sampale baik yang bertikai keluarga ataupun orang lain harus di selesaikan dengan sistem adat dan kelembagaan adat yang bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, pesta panen yang mana di acarakan sesuai dengan adat istiadat yang melibatkan pemerintahan desa sampale.

Lalu salah satu contoh hukum adat di desa sampale di namakan *mekaleppe mane' dan merendeng tedong* yang mana pada kasus ini di berikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum adat yang berupa adanya pertikaian antara masyarakat satu dengan masyarakat lainya dan korban akan menerima permintaan maaf kepada pelaku jika pelaku membawa hewan berupa ayam jika tingkat pelanggaran ringan dan jika pelanggaran berat maka akan di naikkan ke hewan kaki empat seperti kerbau karna kerbau di wilayah mamasa dan kususnya desa sampale dihargai cukup tinggi.

Permasalahan saat ini adalah akibat pengaruh globalisasi, modernisasi dan westernisasi, sebagian masyarakat telah mengabaikan atau meninggalkan praktik-praktik tersebut. Jika terus mengabaikan adat, lambat laun akan melupakan dan mengikis identitas budaya dan adat istiadat dengan mencapai modernisasi (budaya Barat) tanpa menjadi neraka. Seiring waktu, itu akan hilang dan mati. Bahkan dalam Undang-Undang Adat No. 6 Tahun 2014, norma/kearifan lokal yang ada di masyarakat tetap dijaga dan dilindungi.

Oleh karena itu, dalam pemerintahan Indonesia yang merupakan salah satu demokrasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, menarik untuk dikaji lebih dalam tentang makna adat istiadat yang ada di negara ini, maka dalam hal ini saya akan mengangkat judul: *Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Sampale Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa).*

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (Field Research) langsung dari masyarakat melalui observasi dan dokumentasi. Sifat peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Consult Moleong (2017: 89) Pengertian deskripsi kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan solusi dari suatu masalah saat ini berdasarkan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alam, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih

menitikberatkan pada observasi, wawancara mendalam dan dokumen (Prastowo.2012:87). untuk mencegah penyebaran COVID.

Penelitian ini di lakukan di Desa Sampale kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa, Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung mulai dari bulan Februari s/d Maret 2022. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapaun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep dan Tujuan Kepemimpinan Adat di Desa Sampale Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa

Adat dikota mamasa menggunakan hukum adat yang keberadaanya mutlak dan tentunya sudah ada sejak dahulu kala. Hukum adat itu disebut adat Tuo sebagai berikut.

3.1.1. Ada'tuo

Daerah Pitu Ulunna Salu Kondosapata' Uai Sapalelean mengenal hukum yang disebut Ada' Tuo yaitu *"ummita bubunganna ada', tuo tangmate mapia tangkadake (ditampa rara', dikondo bulawan)* dengan jenis hukuman :

- 1) Mariri pala' lentek direngge' ponno disariri la'bi, Artinya adalah jika ada suatu kesalahan yang membuat seseorang malu atau melukai harga diri maka akan di selesaikan dengan beberapa hukuman
- 2) Dibatta lentek tau, tappa lako lentek tedong, artinya Jika membunuh seseorang maka akan di ganti dengan kerbau
- 3) Dibatta lentek tedong tappa lako lentek bai, artinya membayar dengan kerbau akhirnya babi yang menajadi tanggungan
- 4) Dibatta lentek bai tappa lako lentek manuk, Artinya membayar dengan babi akhirnya beralih ke Ayam
- 5) Dibatta lentek manuk, kada pamolena, diganti dengan Ayam maka di usahakan akan diselesaikan dengan cara musyawarah tetua adat
- 6) Dengan istilah : dipakuli dipa'balulang dipatakinni takima., Artinya semua kesalahan apabila di lakukan dengan adat istiadat akan diselesaikan dengan adat istiadat.
- 7) Toma' benden bitti tomak benna kumua, toma'bussuan siku, ditibe (disua) lako padang tadi ada'I, artinya jika aa yang tidak mau menerima keputusan tetua adat maka akan di buang keempat yang tidak beradat.

Hal ini adalah aturan adat apabila ada yang mendapat malu dan diselesaikan dengan adat maka akan di usahakan seperti diatas. Setelah peresmian To' Pao di Mamasa, Ada' Tuo disempurnakan. Semua kehadiran di wilayah Pitu Ulunna Salu berkumpul di Mambi dipimpin oleh **Nene' Dettumanan** dan mencetuskan beberapa semboyan :

*"Mesa kada dipotuo, pantan kada dipomate
Uai mata di pa'indan, petawa talabu'*

Tomalea rangka'na; toborrong penanian; tore'de pampolonganna

Mala ditampa rara' dikondo bulawan"

Kemudian tingkat kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan yang dikatakan dengan Elias Selaku Ketua Lembaga adat mengatakan bahwa yaitu ada 18 dan juga ada beberapa pelanggaran lain mendapat sanksi yaitu sebagai berikut :

"pembunuhan, peracunan, Ungkalung timbu dirangkang, menfitnah, salah sangka. Hubungan zina antara keluarga, menyindir(mataran puduk), mendengar percakapan orang lain/menguping, orang keras (ma'menna kumua), berkelahi dan mengeluarkan darah, Toma' leka-leka, menduduki kubur, menghamili perempuan. menuduh, meludahi, pemali karna orang mati, Palembang sitarru"

Sipekula' Selain itu masih ada bentuk pelanggaran lain yang mendapatkan sanksi hukuman seperti yang dikatakan Matius selaku anggota Lembaga Adat yaitu :

"Kedengan tau urrusa' parri'na to parri', tokasalaan dipepobulle bai, Kedengan tau urrusak panda tomate, dipepobulle bai, Tokemuane / kebaine anna ta'pa lendu' panda pa'totiboyongan umbawa bai lako so'bok, Kedengan tau umbokoi so'bok untunu bai"

Adapun budaya dalam adat mamaasa adalah antara lain sebagai berikut :

Pemali Appa' Randanna

Budaya Mamasa berangkat dari *"pemali appa' randanna"* yaitu :

- | | | | |
|--------------------|------------|------|-------|
| 1. Banne Tau | = 33 Pasal | 700 | butir |
| 2. Pa'totiboyongan | = 44 Pasal | 7000 | butir |
| 3. Kaparrisan | = 22 Pasal | 70 | Butir |
| 4. Panda Tomate | = 1 Pasal | 7 | butir |

Jumlah = 100 pasal 7777 butir

Poin 1 – 3 merupakan acara Rambu Tuka' sedangkan poin 4 adalah acara Rambu Solo'

3.2. Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Sampale Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa

Kearifan Lokal atau sistem pengetahuan lokal merupakan suatu pengetahuan masyarakat atau budaya tertentu yang memiliki khas dan telah berkembang sekian lama dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil proses hubungan timbal balik antara penduduk serta lingkungannya (Syuaib Hannan, Nurfitriah, Mujadilah MK, 2020). Schein melihat budaya kepemimpinan adat dari 3 (tiga) variable dimensi budaya organisasi, yaitu dimensi adaptasi eksternal (external adaptation tasks), dimensi integrasi internal (internal intergration tasks) dan dimensi asumsi-asumsi dasar (basic underlying assumptions), Ada beberapa indikator yang menjadi titik penentu pelaksanaan kepemimpinan adat terhadap pemerintahan yaitu:

3.2.1. Pengaruh Kepemimpinan Adat Eksternal

Sesuai teori Edgar H. Schein, maka untuk mengetahui variable Dimensi Adaptasi Eksternal, indikator-indikator yang akan diteliti lebih lanjut meliputi: misi, tujuan, sarana dasar, pengukuran

keberhasilan dan strategi cadangan. Pada organisasi bussines/private yang berorientasi pada profit, misi merupakan upaya adaptasi terhadap kepentingan-kepentingan investor dan stakeholder, penyedia barang-barang yang dibutuhkan untuk produksinya, manager, karyawan, masyarakat, pemerintah dan konsumen.

3.2.1.1. Dimensi Adaptasi

Nilai nilai adat yang ada di desa dampale masih sangat kuat keberadaannya dimana nilai nilai adat masih sangat dipegang teguh oleh anak anak saat ini. Adapun pengaplikasiannya yaitu ditunjukkan oleh gotong royong yang selalu dilakukan ditiap ada pekerjaan yang mestinya dilakukan dengan bantuan banyak orang.

Sebagai salah satu topik kajian dalam komunikasi antar budaya, adaptasi merupakan suatu problema yang perlu dipecahkan ketika seseorang ataupun sekelompok orang berkomunikasi dengan pihak lain yang berbeda budaya. Adaptasi dalam kajian komunikasi antar budaya ini pada umumnya dihubungkan dengan perubahan dari masyarakat atau bagian dari masyarakat. Seseorang yang memilih strategi adaptif cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap harapan dan tuntutan dari lingkungannya, sehingga siap untuk mengubah perilaku.

Cultural adaptation merupakan proses dasar komunikasi yaitu di mana ada penyampai pesan, medium dan penerima pesan, sehingga terjadi proses encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru. Terjadi proses pengiriman pesan oleh penduduk lokal di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh individu pendatang, hal ini dinamakan enculturation. Enculturation terjadi pada saat sosialisasi.

3.2.1.2. Dimensi Integrasi

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepala dusun yang disebut Depati yang dipilih melalui musyawarah ia mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan dusun dalam masa kepemimpinannya maupun setelahnya. Karena sistem adat yang melekat dalam setiap jiwa masyarakat dan lingkungan yang mendukung, sehingga memberikan suatu doktrine adat yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberlangsungan relasi sosial yang terjadi antara kelompok-kelompok di masyarakat tidak lepas dari dua dimensi hubungan yang saling melengkapi. Pertama, dimensi hubungan integrasi dan kedua adalah dimensi hubungan konflik. Dimensi hubungan integrasi adalah melihat pada relasi sosial yang terjadi ketika masing-masing kelompok masyarakat memiliki persamaan-persamaan tujuan sehingga kedua kelompok tersebut melakukan penyatuan, sedangkan dimensi hubungan konflik melihat pada perbedaan-perbedaan tujuan yang menyebabkan terjadi konflik diantara mereka. Meskipun kedua dimensi ini memiliki makna yang berbeda, namun kemunculannya selalu ada dan terus mengikuti seiring dengan berlangsungnya relasi sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi yang paling sehat untuk masyarakat bukan terletak pada keseimbangan antara integrasi dan konflik, tetapi

kondisi yang memungkinkan perkembangan bagi keduanya (integrasi dan konflik).

3.2.1.3. Dimensi Asumsi-Asumsi Dasar

Indikator-indikator yang untuk mengetahui variable dimensi asumsi-asumsi dasar, yaitu: hubungan dengan lingkungan, hakekat kegiatan manusia, hakekat kenyataan dan kebenaran, hakekat waktu, hakekat kebenaran manusia, hakekat hubungan antar manusia, homogenitas versus heterogenitas.

Dari wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kearifan lokal saat ini masih sangat terjaga karena beberapa pihak masih menjaga dan melestarikan keadatan di desa Sampale membuat keadatan masih terjaga dengan baik. Dan juga keharmonisan pun sellau ada di mana dengan kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal membuat rasa persaudaraan semakin terikat dan kuat dan rasa kekeluargaan selalu terjaga dengan rukun.

Kehadiran integrasi sngat jelas bermanfaat guna memperkuat hubungan sosial yang terjadi. Munculnya sikap saling menghormati orang lain, menghargai perbedaan dan toleransi yang tinggi hanya bisa terwujud jika masing-masing masyarakat baik secara individu maupun kolektif bisa saling berbaur dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi intensitas kerja samanya dan semakin banyak individu-individu yang terlibat maka semakin tinggilah integrasi yang terjadi. Namun dibalik hubungan integrasi, relasi antar masyarakat juga menghasilkan konflik. Konflik ini muncul sebagai konsekuensi semakin intens hubungan yang berlangsung. Semakin kohesif suatu masyarakat saling berhubungan, maka semakin besar perbedaan-perbedaan yang dimiliki di antara mereka terlihat. Perbedaan yang dimaksudkan dapat berupa materi, persepsi, tujuan, nilai dan norma yang berlaku pada masing-masing kelompok. Oleh karena itu munculnya konflik di satu sisi dapat menghancurkan relasi antar masyarakat dan di sisi lain bisa memperkuat tingkat integrasi yang terbangun.

3.2.2. Kepemimpinan Adat Internal

Menurut Edgar H. Schein, budaya, dan adat kepemimpinan mengacu ke suatu system makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya untuk membedakan organisasi itu terhadap organisasi lain. Schein menjelaskan unsur-unsur budaya, yaitu: ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, perilaku/kebiasaan (norma) masyarakat, asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran/pewarisan, dan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

3.2.2.1. Artefacts

Artefacts tingkat pertama/atas dimana kegiatan atau bentuk organisasi terlihat seperti struktur organisasi maupun proses, lingkungan fisik organisasi dan produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa peninggalan budaya atau adat yang masih melekat hingga saat ini desa Sampael adalh dalam produk adat yaitu penyambutan tamu , menjaga kenyamanan dan kemandirian masyarakat serta peayaan hari hari raya besar.dan dianggap sangat baik karena msih terjaga dan juga menjdi warisan dalam

desa Sampale dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Kepemimpinan transformasional harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi.

3.2.2.2. Espoused Values

Espoused Values, tingkat kedua adalah nilai-nilai yang didukung, terdiri dari strategi, tujuan, dan filosofi organisasi. Tingkat ini mempunyai arti penting dalam kepemimpinan, nilai-nilai ini harus ditanamkan pada tiap-tiap anggota organisasi.

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa sampale sudah sangat bagus karena menggunakan gotong royong sebagai alat untuk mempersatukan masyarakat dan juga menjadi media untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan juga kekeluargaan. Dengan filosofi filosofi yang erat dengan gotong royong membuat masyarakat desa sampale selalu merawat tradisi yang selama ini tak pernah hilang di bumi kondosapata yaitu "mesa kada di potuo pantang kada dipomate."

3.2.2.3. Underlying Assumption

Underlying Assumption, asumsi yang mendasari, yaitu suatu keyakinan yang dianggap sudah harus ada dalam diri tiap-tiap anggota mengenai organisasi yang meliputi aspek keyakinan, pemikiran dan keterikatan perasaan terhadap organisasi.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa perasaan persaudaraan dan juga kekeluargaan menjadi tradisi dan juga menjadi faktor penggerak berlangsungnya kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal. Dan menjadi tujuan pokok kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal sehingga membuat desa sampale selalu merawat tradisi yang ada di desa.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat dirampung oleh penulis yaitu :

- 1) Peran kepemimpinan adat di desa sampale masih sangat berbasis kearifan lokal dilihat dari penentuan kebijakan sering dilakukan dengan musyawarah bersama lembaga adat yang belaku.
- 2) Ada dua indikator penentu peran kepemimpinan adat di desa sampale berbasis kearifan lokal yaitu :
 - a) Pengaruh Kepemimpinan Adat Eksternal yaitu Dimensi Adaptasi Eksternal (*External Adaptation Tasks*) Sesuai teori Edgar H. Schein, maka untuk mengetahui variabel Dimensi Adaptasi Eksternal, indikator-indikator yang akan diteliti lebih lanjut meliputi: misi, tujuan, sarana dasar, pengukuran keberhasilan dan strategi cadangan. Pada organisasi bisnis/private yang berorientasi pada profit, misi merupakan upaya adaptasi

terhadap kepentingan-kepentingan investor dan stakeholder, penyedia barang-barang yang dibutuhkan untuk produksinya, manager, karyawan, masyarakat, pemerintah dan konsumen. Dimensi Integrasi Internal (*Internal Intergration Tasks*) Dimensi Integrasi Internal, indikator-indikator yang akan diteliti, yaitu: bahasa yang sama, batasan dalam kelompok, penempatan status/kekuasaan, hubungan dalam kelompok, penghargaan dan bagaimana mengatur yang sulit diatur. Dimensi Asumsi-Asumsi Dasar (*Basic Underlying Assumptions*) Indikator-indikator yang untuk mengetahui variabel dimensi asumsi-asumsi dasar, yaitu: hubungan dengan lingkungan, hakekat kegiatan manusia, hakekat kenyataan dan kebenaran, hakekat waktu, hakekat kebenaran manusia, hakekat hubungan antar manusia, homogenitas versus heterogenitas.

- b) Pengaruh Kepemimpinan Adat Internal yaitu *Artefacts*, tingkat pertama/atas dimana kegiatan atau bentuk organisasi terlihat seperti struktur organisasi maupun proses, lingkungan fisik organisasi dan produk-produk yang dihasilkan. *Espoused Values*, tingkat kedua adalah nilai-nilai yang didukung, terdiri dari strategi, tujuan, dan filosofi organisasi. Tingkat ini mempunyai arti penting dalam kepemimpinan, nilai-nilai ini harus ditanamkan pada tiap-tiap anggota organisasi. *Underlying Assumption*, asumsi yang mendasari, yaitu suatu keyakinan yang dianggap sudah harus ada dalam diri tiap-tiap anggota mengenai organisasi yang meliputi aspek keyakinan, pemikiran dan keterikatan perasaan terhadap organisasi.

5. SARAN

Adapun Saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

- 1) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan model Kepemimpinan adat berbasis kearifan lokal di Desa Sampale. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang adat dan juga bentuk kepemimpinan pemangku adat. Dan ada dua indikator utama dalam peran kepemimpinan pemangku adat yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Eksternal dan Internal. Peran kepemimpinan adat di desa sampale masih sangat berbasis kearifan lokal dilihat dari penentuan kebijakan sering dilakukan dengan musyawarah bersama lembaga adat yang belaku.
- 2) Bagi pemerintah Desa Sampale sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang

akan datang dalam upaya meningkatkan model kepemimpinan pemangku adat di era globalisasi saat ini.

- 3) Dalam upaya meningkatkan Model Kepemimpinan pemangku adat diharapkan pemerintah Desa selalu berjalan searah dengan pemangku adat di Desa Sampale. Peran kepemimpinan adat di desa sampale masih sangat berbasis kearifan lokal dilihat dari penentuan kebijakan sering dilakukan dengan musyawarah bersama lembaga adat yang belaku.

Schein, Edgar H.,(2010), *Organizational Culture And Leadership*. Jossey Bass. San Fransisco.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Permendagri 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia
- Antariksa. 2012. *Kearifan Budaya Lokal Dalam Arsitektur*. Bahan Ajar Pascasarjana Arsitektur Lingkungan Binaan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ardiansyah P. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal (studi didesa penapalan kecamatan tengah ilir kabupaten tebo)*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi
- Arifin, H. Syamsul. 2012. *Leadership Ilmu Dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta Mitra Wacana Media
- Davis, Keith Dan Newstrom. 2014. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dewi, Andi Ratnasari dan Dr Hasniaty. 2017. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju*. JBMI Vol. 14 No. 2 Oktober 2017
- Eko Maulana Ali. 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*. PT. Multicerdas Publishing. Jakarta
- Geurtjens H. 2016. *Kehidupan Orang Kei di Zaman Dahulu (diterjemahkan oleh C.J Bohm. MSC)*. Gunung Sopai: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian kualitatif*. Cetakan ke-36, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nur Aedah. 2017. *Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal dalam Pemerintahan Kampung di Kampung Waena Kota Jayapura*. Jurnal ekologi Birokrasi : Pascasarjana Uncen.
- Sjuuib Hannan, Nurfitriah, Mujadilah MK, 2020. Peran Pemerintah dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Jurnal Peqquruang : UNASMAN, Polewali Mandar